

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia

Volume 2, Nomor 8, November 2023, Halaman 46-53

Licensed by CC BY-SA 4.0

ISSN: 2986-7002

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10137992>

Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi oleh Dosen Ekonomi Pembangunan UPN “Veteran” Jatim di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan

Fauzatul Laily Nisa^{1*}, Cholid Fadil²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

*Email korespondensi: f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id

Abstrak

Motivasi penelitian ini adalah belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi. Berdasarkan kondisi obyektif yang ditemukan pada saat pengkajian, peneliti menemukan beberapa permasalahan yaitu belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat dalam menjamin pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang perekonomian sehingga perekonomian masyarakat di Desa Turi tidak berfungsi dengan baik dan rendah. Tingkat tersebut adalah kurangnya kemampuan pemerintah desa dalam melakukan penguatan masyarakat dan rendahnya kepedulian pemerintah desa terhadap keadaan perekonomian masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumenter dan penelitian lapangan berupa observasi dan wawancara. Kendala dalam pemberdayaan ekonomi antara lain: (1) terbatasnya anggaran penyelenggaraan pelatihan dan terbatasnya pengetahuan aparat desa, (2) rendahnya kesadaran masyarakat itu sendiri yang enggan membandingkan dengan daerah lain, (3) anggaran yang harus disediakan sebagai modal kegiatan kelompok, (4) jaringan sinyal yang terbatas sehingga pemanfaatannya kurang maksimal, (5) sulitnya media informasi dalam mengetahui perkembangan pasar. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut antara lain: (1) merancang dan menetapkan anggaran desa untuk melatih pelaku ekonomi, (2) memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pelaku ekonomi agar dapat melakukan perbandingan dengan daerah lain sehingga pengendalian dapat menjamin kegiatannya, (3) otoritas desa meminta informasi dari badan atau badan legalitas dan segera menginformasikan kepada masyarakat tentang cara memastikan legalitas, (4) integrasi jaringan atau sinyal Internet dengan memasang jaringan berkecepatan tinggi atau sejenisnya (5) membangun hubungan baik dan berkomunikasi dengan pihak lain untuk memperoleh informasi yang diinginkan.

Kata kunci: *Pemberdayaan, Masyarakat, Ekonomi Desa*

Article Info

Received date: 20 October 2023

Revised date: 29 October. 2023

Accepted date: 12 November 2023

PENDAHULUAN

Konsep pemberdayaan muncul sebagai cikal bakal wacana pembangunan ketika masyarakat mulai mempertanyakan makna pembangunan. Wacana pemberdayaan muncul ketika industrialisasi menciptakan masyarakat yang menguasai faktor-faktor produksi dan masyarakat yang menguasai pekerja. Di negara-negara berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan mengarah pada pemisahan sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumber daya alam dan keterasingan masyarakat dari faktor-faktor produksi oleh pihak yang berkuasa.

Secara keseluruhan, pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari penguatan masyarakat. Namun, angka kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang terus menghambat implementasi solusi pembangunan yang ada. Kemiskinan di negeri ini ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan

menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan negara dan kemenangannya tidak dapat ditunda. Tujuan bidang ekonomi Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah memberikan bantuan rekonstruksi untuk mendukung masyarakat kurang mampu, dengan tujuan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat di bidang sosial dan keterampilan.

Penguatan sektor perekonomian pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Turi harus dilaksanakan secara optimal dan spesifik untuk memperbaiki situasi dan kondisi perekonomian masyarakat miskin yang ada. Secara umum, para tunawisma menerima upah yang rendah. Rendahnya upah yang diterima para tunawisma disebabkan karena mereka pada umumnya memiliki keterampilan yang terbatas dan sikap mental yang buruk (rendahnya kebutuhan akan hasil, kurang disiplin).

Rendahnya keterampilan komunitas tunawisma disebabkan oleh terbatasnya akses atau penggunaan layanan pendidikan. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi yang realistis terhadap komunitas profesional tunawisma terjadi melalui langkah-langkah positif (misalnya beasiswa untuk tunawisma) di sektor pendidikan. Untuk menerapkan langkah-langkah positif bagi para tunawisma, pemerintah harus memiliki sumber daya keuangan yang diperlukan. Dana dapat dihimpun melalui kebijakan fiskal, misalnya melalui pajak progresif.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pada Bab (2) “Kelembagaan Masyarakat Perdesaan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, memberikan wadah bagi partisipasi masyarakat pedesaan sebagai mitra pemerintah desa. (3) Tujuan lembaga sosial pedesaan dalam hal ini, untuk memperkuat komunitas pedesaan, berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan masyarakat pedesaan. (4) Penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah/daerah, dan lembaga non-pemerintah akan memperkuat dan memperkuat kedudukan lembaga-lembaga sosial yang ada di desa.

Namun pada kenyataannya penguatan kekuasaan di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dinilai masih kurang optimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah desa terhadap perekonomian masyarakat desa Turi. Berdasarkan penelitian awal penulis, terlihat belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian. Hal ini dipicu oleh:

1. Pemerintahan pedesaan masih kurang optimal dalam memberdayakan masyarakatnya, khususnya di bidang perekonomian. Misalnya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) kurang mampu berperan aktif dalam memperkuat masyarakat, khususnya secara ekonomi.
2. Buruknya kapasitas pemerintah pedesaan untuk memperkuat masyarakat. Di Desa Turi misalnya, masih tingginya angka pengangguran yang terutama menimpa generasi muda.
3. Rendahnya kepedulian pemerintah pedesaan terhadap kondisi perekonomian masyarakatnya. Misalnya, pengembangan unit ekonomi mikro di Desa Turi, seperti penjual garam, pedagang tepung dan udang, kurang mendapat dukungan dari pemerintah desa.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif serta memberikan informasi mengenai pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan langsung dari perangkat desa melalui observasi dan wawancara. Sumber data yang digunakan peneliti untuk melengkapi data adalah informan. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 10 orang, dengan rincian; Walikotadesa 1 orang, sekretaris desa 1 orang, perangkat desa 3 orang dan wakil masyarakat

5 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi pustaka dan penelitian lapangan (observasi dan wawancara), dengan waktu pelaksanaan selama 2 hari lamanya. Langkah-langkah analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, visualisasi data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi oleh Dosen Ekonomi Pembangunan UPN “Veteran” Jawa Timur di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan

Pembahasan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi yang dilakukan pemerintah Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Maget didasarkan pada dimensi indikator strategi pemberdayaan menurut Ismawan (Priyono, 1996) dalam Mardikanto dan Soebianto (2017:170) yang terdiri dari:

- a) Pengembangan personel;
- b) Pengembangan kelembagaan kelompok;
- c) pemupukan modal publik (swasta);
- d) Perkembangan perusahaan-perusahaan produktif;
- e) Penyediaan informasi yang tepat.

Pada bagian ini dijelaskan temuan penelitian dan pembahasan mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian pada Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, sebagai berikut:

a) Pengembangan SDM

Berdasarkan temuan penelitian pada dimensi pengembangan sumber daya manusia untuk indikator, pemerintah pedesaan mengizinkan dalam bentuk pelatihan bagi perusahaan yang pelaksanaannya belum optimal, terbukti dengan terbatasnya anggaran yang tersedia bagi pemerintah pedesaan. Memberikan pelatihan untuk perusahaan komersial. Selain itu, indikator-indikator yang memberikan masukan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan perbandingan di luar desa juga belum dilaksanakan secara optimal, hal ini terlihat dari masih terbatasnya kemampuan pemerintah desa untuk menyadarkan pelaku ekonomi terhadap perbandingan di luar desa. Di luar desa.

b) Pengembangan Kelembagaan Kelompok

Berdasarkan temuan penelitian pada dimensi pengembangan kelembagaan kelompok untuk indikator, pemerintah pedesaan berkontribusi dalam menciptakan persyaratan hukum bagi kelompok usaha. Implementasinya yang belum optimal terlihat dari masih adanya beberapa pelaku ekonomi yang belum menciptakan kondisi hukum. Selain itu, indikator tata kelola perdesaan yang menjamin sosialisasi dan penciptaan legitimasi kelompok atau organisasi juga belum dilaksanakan secara optimal, terbukti dengan masih adanya pelaku ekonomi atau publik yang belum memahami cara menciptakan legitimasi kelompok atau organisasi.

c) Pemupukan Modal Publik (Swasta)

Berdasarkan hasil penelitian dimensi perolehan modal pemerintah (swasta) untuk indikator, dukungan negara pedesaan dalam bentuk permodalan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang pelaksanaannya masih belum optimal, terbukti dengan adanya tidak selalu ada badan usaha yang mengalami kesulitan permodalan. Selain itu, indikator kemampuan pemerintah desa dalam menyediakan sarana dan prasarana usaha juga masih belum terlaksana secara optimal, terbukti dengan masih adanya perusahaan atau perseorangan yang kesulitan mencari tempat atau negara yang dapat dijadikan kantor pusatnya. Bekerja.

d) Perkembangan Produktif Perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian pada Dimensi Pengembangan Usaha Produktif untuk Indikator Pemerintah Desa mendukung perusahaan atau kelompok dalam mengembangkan usahanya melalui pengembangan website. Penerapannya masih belum optimal, hal ini terlihat

dari masih adanya perusahaan yang belum memiliki website sebagai sarana atau sarana untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, indikator otonomi pedesaan yang memberikan keleluasaan bagi setiap perusahaan untuk bersaing dalam harga atau produk yang dihasilkan, belum dilaksanakan secara optimal, hal ini terlihat dari masih adanya perusahaan-perusahaan yang kurang profesional dalam bersaing dalam harga atau produk yang dihasilkan.

e) Memberikan Informasi yang Relevan

Berdasarkan hasil penelitian dimensi memberikan informasi yang relevan untuk indikator. Pemerintah desa memastikan pengembangan pasar menjangkau setiap masyarakat. Penerapannya masih belum optimal, terbukti dengan masih adanya perusahaan komersial yang belum mengalami perkembangan usaha. Selanjutnya indikator mengenai Pemerintah Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bisa menjadi wadah bagi para pelaku usaha apabila menemukan kesulitan atau hambatan dalam usahanya masih belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini ditandai dengan masih adanya para pelaku usaha yang merasa kebingungan ketika mendapatkan masalah lapangan terutama permasalahan mengenai usahanya.



Gambar 1. Proses Pemaparan Materi

2) Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi oleh Dosen Ekonomi Pembangunan UPN “Veteran” Jawa Timur di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan

Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, diantaranya yaitu keterbatasannya anggaran untuk melakukan pelatihan serta keterbatasan pengetahuan dari pemerintah desa itu sendiri sehingga kesulitan dalam memberikan pengetahuan mengenai sistem perekonomian yang baik, kurangnya kesadaran dari masyarakatnya sendiri yang enggan melakukan perbandingan ke daerah lain, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk segera menyiapkan semua persyaratan untuk membuat persyaratan legalitas kelompok usaha, minimnya pengetahuan dari pemerintah desa mengenai cara pembuatan legalitas kelompok usaha, keterbatasan keterbatasan anggaran untuk dialokasikan sebagai permodalan bagi para kelompok usaha, keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa untuk dialokasikan sebagai tempat untuk dijadikan usaha, keterbatasan jaringan atau signal sehingga kurang maksimal dalam penggunaannya serta SDM dari masyarakat atau pelaku usaha yang masih kurang, masih adanya pelaku usaha yang melanggar aturan persaingan dagang yang sehat, kesulitan media informasi dalam mencari tahu perkembangan pasar, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk ikut bergabung menjadi anggota Bumdes.

Hasil observasi menunjukkan terdapat hambatan-hambatan dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, diantaranya keterbatasannya anggaran untuk melakukan pelatihan serta keterbatasan pengetahuan dari pemerintah desa itu sendiri sehingga kesulitan dalam memberikan pengetahuan mengenai sistem perekonomian yang baik, kurangnya kesadaran dari masyarakatnya sendiri yang enggan melakukan perbandingan ke daerah lain, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk segera menyiapkan semua persyaratan untuk membuat persyaratan legalitas kelompok usaha, minimnya pengetahuan dari pemerintah desa mengenai cara pembuatan legalitas kelompok usaha, keterbatasan anggaran untuk dialokasikan sebagai permodalan bagi para kelompok usaha, keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa untuk dialokasikan sebagai tempat untuk dijadikan usaha, keterbatasan jaringan atau signal sehingga kurang maksimal dalam penggunaannya serta SDM dari masyarakat atau pelaku usaha yang masih kurang, masih adanya pelaku usaha yang melanggar aturan persaingan dagang yang sehat, kesulitan media informasi dalam mencari tahu perkembangan pasar, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk ikut bergabung menjadi anggota Bumdes.

Pemberdayaan menurut Mas'ood (2015) dalam Mardikanto dan Soebianto (2017:26) adalah "Upaya memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat".

Menurut Imran (2018:30), konsep pemberdayaan pada hakikatnya meliputi: "Berjuang untuk menciptakan iklim kemanusiaan yang adil dan sipil yang semakin efektif secara struktural dalam bidang politik, sosial, budaya dan ekonomi, dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bernegara, regional dan internasional. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan teori, pemberdayaan adalah upaya memberikan kekuasaan atau kekuatan kepada suatu masyarakat agar iklim kemanusiaan yang adil dan sipil lebih efektif secara struktural baik pada tataran politik, sosial, budaya dan ekonomi, keluarga, kehidupan, masyarakat, negara, tingkat regional dan internasional."

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan teori, pemberdayaan adalah upaya memberikan daya atau kekuatan kepada masyarakat, dengan menciptakan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab yang lebih efektif secara struktural di bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi, baik di bidang politik, sosial, budaya, maupun ekonomi. tingkat keluarga, masyarakat dan perekonomian. kehidupan nasional, regional, dan internasional.



Gambar 2. Lokasi Pemaparan di Kantor Desa Turi, Kec. Panekan, Kab. Magetan

- 3) Upaya Dosen Ekonomi Pembangunan UPN “Veteran” Jawa Timur di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan untuk mengatasi kendala terkait pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian

Mempelajari upaya Dosen Ekonomi Pembangunan UPN “Veteran” Jawa Timur di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dalam mengatasi hambatan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, termasuk perencanaan dan penetapan anggaran desa yang didedikasikan untuk pelatihan usaha dan pemerintahan desa. Ketika seorang ahli ekonomi meminta bantuan kepada instansi terkait, ia merupakan orang yang berkompeten dalam hal pelatihan, memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kepadabadan usaha sehingga dapat melakukan perbandingan dengan daerah lain, memberikan gambaran mengenai kegiatan dan kegiatannya. Melaksanakan sosialisasi dalam rangka memperjelas kebutuhan terkait dengan pelaksanaan perbuatan hukum dan menyampaikan pentingnya kepatuhan terhadap hukum, perangkat desa meminta informasi kepada dinas atau instansi yang membidangi perbuatan hukum dan segera memberikan informasi mengenai hal tersebut kepada masyarakat. masyarakat, bagaimana perbuatan hukumnya melakukan transaksi, mengalokasikan dana desa kepada Bumdes sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk dijadikan tempat usaha, menambah jaringan atau sinyal internet melalui pemasangan broadband atau sejenisnya dan memperoleh bantuan dari pihak-pihak yang lebih mengetahui penggunaan website, memastikan bahwa mereka memahami persaingan usaha yang baik dan tidak merugikan pihak lain, menjalin kontak dan komunikasi yang baik dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, dan menyampaikan pemahaman dalam bidang ekonomi dan memastikan Bumdes menjadi mitra desa dan dapat menjadi wadah bagi para pelaku usaha di bidang perekonomian.

Hasil observasi menunjukkan bahwa Dosen Ekonomi Pembangunan UPN “Veteran” Jawa Timur di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan berupaya mengatasi hambatan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, termasuk mengembangkan dan menyiapkan anggaran desa untuk pelatihan pelaku ekonomi dan perangkat desa mencari dukungan dari otoritas terkait. Badan usaha spesialis merupakan orang yang berkompeten dalam hal memberikan pelatihan dan memberikan pemahaman kepada masyarakatkhususnya perusahaan sehingga dapat bekerjasama dengan daerah lain untuk memberikan informasi tentang kegiatannya dan melakukan kontak tentang kondisi yang diperlukan untuk pelaksanaan perbuatan hukum dan untuk memastikan bahwa pentingnya kepatuhan terhadap hukum dipahami, pemerintah desa harus meminta informasi dari departemen atau badan yang terlibat dalam pelaksanaan perbuatan hukum dan memberikan Masyarakat segera memberikan informasi tentang caranya untuk melakukannya.

Ini harus digunakan sebagai stasiun kerja untuk meningkatkan sinyal jaringan atau internet Anda dengan menginstal Speedy atauserupa dan mencari bantuan dari orang-orang yang tahu lebih banyak tentang penggunaan situs web. Pastikan Anda memahami betul persaingan bisnis dan tidak merugikan pihak lain. Menjalinkan hubungan dan komunikasi yang baik, baik dengan pihak lain untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, maupun agar masyarakat khususnya yang bekerja di bidang perekonomian dapat memahami dan menjelaskan bagaimana mereka dapat menjadi anggota Bumde yang dapat dilakukan oleh Bumdes sebagai mitra desa. dijadikan wadah bagi para wirausaha di bidang perekonomian.

Menurut Sulistiyani (2004:80), tujuan yang ingin dicapai melalui pemberdayaan adalah: Melatih individu dan masyarakat untuk mandiri, termasuk kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat adalah suatu keadaan yang dialami suatu masyarakat yang ditandai dengan kemampuan berpikir, memutuskan, dan melakukan apa yang diyakininya benar guna mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya, sehingga memanfaatkan keterampilan kognitif, kreatif,

psikomotorik, dan afektif serta menggerakkan masyarakat sumber daya dalam lingkungan internal masyarakat.

Berdasarkan penelitian, wawancara dan teori di atas, tujuan pemberdayaan adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, termasuk dalam berpikir, bertindak dan percaya pada apa yang dilakukannya. Kemandirian masyarakat adalah suatu keadaan yang dialami suatu masyarakat yang ditandai dengan kemampuan berpikir, memutuskan dan melakukan apa yang diyakininya benar guna mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya, dengan menggunakan keterampilan yang meliputi keterampilan kognitif, konatif, psikomotorik, dan afektif, dengan mobilisasi sumber daya, kekuatan yang dimiliki lingkungan internal masyarakat.



Gambar 3. Foto Bersama Masyarakat Desa Turi

KESIMPULAN

Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi oleh Dosen Ekonomi Pembangunan UPN “Veteran” Jawa Timur di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan sudah dilaksanakan dengan optimal, sesuai dengan indikator 5 (lima) program strategi pemberdayaan menurut Ismawan (Priyono, 2013) dalam Mardikanto dan Soebianto (2022:170), hal ini diketahui dari 10 indikator yang diteliti hanya 3 yang dilaksanakan dengan baik dan sisanya 7 indikator belum dilaksanakan dengan baik.

Hasil observasi menunjukkan bahwa Dosen Ekonomi Pembangunan UPN “Veteran” Jawa Timur di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan berupaya mengatasi hambatan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, termasuk mengembangkan dan menyiapkan anggaran desa untuk pelatihan pelaku ekonomi dan perangkat desa mencari dukungan dari otoritas terkait. Badan usaha spesialis merupakan orang yang berkompeten dalam hal memberikan pelatihan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya perusahaan sehingga dapat bekerjasama dengan daerah lain untuk memberikan informasi tentang kegiatannya dan melakukan kontak tentang kondisi yang diperlukan untuk pelaksanaan perbuatan hukum dan untuk memastikan bahwa pentingnya kepatuhan terhadap hukum dipahami, pemerintah desa harus meminta informasi dari departemen atau badan yang terlibat dalam pelaksanaan perbuatan hukum dan memberikan Masyarakat segera memberikan informasi tentang caranya untuk melakukannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis Mengucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Civitas Akademika UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberi dukungan terhadap Program Pengabdian kepada Masyarakat ini.

Referensi

- Finer, 2006. *Comparative Government*. terjemahan. Ghalia. Indonesia.
- Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hidayat A.A., 2010. *Metode Penelitian Kesehatan Paradigma. Kuantitatif*, Jakarta: Heath Books Hutomo
- Mardi Yatmo. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Moleong. 2017 *Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Miles M dan Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Moleong, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.
- Poerwadarminta, 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pranadjaja. 2003. *Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan. Alumni*. Bandung
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.